

Konsep Dasar Kekuatan Sosial Politik

Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi, SU
Drs. Rasyid Thaha, M.Si.



PENDAHULUAN

Sebagai fenomena sering muncul dalam suatu negara, misalnya fenomena dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Fenomena seperti ini, menyebabkan perlunya dipahami konsep dasar kekuatan sosial politik. Hal ini penting, karena kekuatan adalah hasil dominasi melalui penggunaan kekuasaan berupa kemampuan kelompok memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Dalam hubungan dengan itu untuk memahami materi konsep dasar kekuatan sosial politik, maka dimulai dengan menjelaskan konsep sosial dalam kaitannya dengan masyarakat, dan konsep politik dalam kaitannya dengan kekuasaan, serta sosiologi politik dengan fokus kajian pada aspek hubungan kekuasaan dengan struktur masyarakat.

Pemahaman terhadap konsep-konsep dasar tersebut, menjadi bagian penting dan sangat berguna bagi Anda dalam memahami konsep kekuasaan sosial politik. Kekuasaan sosial adalah kemampuan dalam hubungan-hubungan dan proses-proses sosial, sedangkan kekuasaan politik merupakan kemampuan mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Selanjutnya, pada bagian lain (kegiatan belajar 3) dalam modul ini, dijelaskan pula mengenai organisasi kekuatan sosial politik yang dalam literatur ilmu politik diartikan sama dengan partai politik (Budiardjo, 1983).

Suatu fenomena yang sangat penting dan sangat berguna untuk Anda pahami dalam kaitannya dengan partai politik adalah gerakan dari kelompok-kelompok sosial. Gerakan sosial merupakan suatu sarana dari anggota-anggota masyarakat untuk dapat mengungkapkan ketidaksetujuan dan oposisi secara langsung, sedangkan partai politik merupakan sarana yang sangat diperlukan demi mencapai atau mempertahankan kekuasaan, dengan berbagai fungsi yang harus dijalankan.

Untuk selanjutnya setelah mempelajari dan memahami modul ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan:

- a. konsep kekuatan sosial;
- b. konsep kekuatan politik;
- c. kekuatan sosial politik.

KEGIATAN BELAJAR 1

Konsep Kekuatan Politik

Sebagai dasar dalam memahami materi konsep kekuatan sosial, maka pada kegiatan belajar 1 ini beberapa konsep perlu Anda pahami. Uraian dimulai dengan menjelaskan konsep sosial, yaitu suatu konsep yang umumnya digunakan dalam menunjuk objeknya yaitu masyarakat, seperti hubungan-hubungan dan proses-proses sosial, dan sebagainya. Kemudian dijelaskan mengenai konsep politik terutama dalam kaitannya dengan kekuasaan. Pada bagian lain dalam kegiatan belajar 1 ini, juga dideskripsikan mengenai konsep sosiologi politik, yaitu suatu kajian yang menekankan pada aspek hubungan kekuasaan dengan struktur masyarakat.

A. KONSEP SOSIAL

Istilah sosial (*social*) dalam ilmu-ilmu sosial umumnya digunakan untuk menunjuk objeknya yaitu masyarakat. Istilah masyarakat (*society*) itu sendiri didefinisikan bermacam-macam, sehingga agak sulit untuk memberikan batasan yang tegas mengenai pengertian masyarakat. Meskipun demikian, untuk memberikan dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat, berikut ini dikemukakan beberapa definisi yang dikutip Soekanto (1990) sebagai berikut:

- a. Mac Iver dan Page, mengemukakan bahwa “Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah-laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah”.
- b. Ralph Linton, mengemukakan bahwa “Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”.
- c. Selo Sumardjan, menyatakan bahwa “Masyarakat adalah *orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan*”.

Menurut Soekanto, meskipun sarjana tersebut berbeda dalam mendefinisikan masyarakat, namun pada dasarnya isinya sama yaitu masyarakat mencakup beberapa unsur, sebagai berikut:

- a. *Manusia hidup bersama*. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan *berapa jumlah manusia* yang harus ada. Akan tetapi secara *teoritis* angka *minimnya adalah dua* orang yang hidup bersama.
- b. *Bercampur untuk waktu yang cukup lama*. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan *timbul manusia-manusia baru*. Manusia itu juga dapat *bercakap-cakap*, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai *keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan* atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah *sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan* yang mengatur hubungan manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu *kesatuan*.
- d. Mereka merupakan suatu *sistem hidup bersama*. Sistem hidup bersama menimbulkan *kebudayaan* oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Ilmu pengetahuan yang fokus analisisnya menekankan pada masyarakat adalah “sosiologi”. Sosiologi mempelajari unsur-unsur kemasyarakatan secara keseluruhan, seperti; hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial atau proses-proses sosial, struktur sosial, interaksi sosial, organisasi atau kelompok-kelompok sosial, dan sebagainya. Dalam kaitan dengan kekuatan sosial politik, misalnya dalam memperoleh kekuasaan, digambarkan dalam sosiologi melalui salah satu bentuk persaingan atau bahkan konflik dari berbagai kelompok sosial yang bersaing.

B. KONSEP POLITIK

Dari segi etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani, polis yang dapat berarti kota atau negara-kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkan kata-kata lain seperti “polites” (warga negara) dan “politikos” nama sifat yang berarti kewarganegaraan (*civic*), dan “politike techne” untuk kemahiran politik serta “politike episteme” untuk ilmu politik. Kemudian orang Romawi

mengambil alih perkataan Yunani itu dan menamakan pengetahuan tentang negara (pemerintah) “ars politica”, artinya kemahiran (kunst) tentang masalah-masalah kenegaraan (Isjwara, 1982).

Menurut Duverger (1993), sejak manusia pertama kali berpikir tentang politik, mereka terombang-ambing di antara dua pengertian (interpretasi) yang saling bertentangan secara diametrik. Sebagian orang menafsirkan politik secara hakiki adalah pergolakan pertempuran. Kekuasaan memungkinkan kelompok dan individu-individu yang memegangnya untuk mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat dan mengeksploitasinya; kelompok dan individu lain menentang dominasi dan eksploitasi dengan berusaha melawan dan membinasakannya. Tafsiran kedua menganggap politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Kekuasaan melindungi kemakmuran umum dan kepentingan umum (*common good*) dari tekanan dan tuntutan kelompok-kelompok kepentingan yang khusus.

Selain kedua tafsiran tentang politik tersebut, dalam kepustakaan ilmu politik, berbagai pandangan tentang konsep atau arti dari politik: misalnya: negara dipandang sebagai inti dari politik; kekuasaan dipandang sebagai inti dari politik; politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum; politik berkaitan dengan kebijaksanaan umum; dan politik adalah berkaitan dengan masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Dari berbagai perbedaan pandangan tersebut, Budiardjo (1983) menyimpulkan bahwa unsur-unsur pokok yang terkandung dalam pengertian politik, mencakup; negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian.

Pertama, Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Pandangan yang menekankan negara sebagai inti dari politik memusatkan perhatian pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Pandangan ini bersifat tradisional dan ruang lingkupnya agak sempit, dan disebut sebagai pendekatan institusional (*institutional approach*).

Kedua, Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Pandangan yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik, menekankan pada masalah perjuangan kekuasaan dengan tujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pandangan ini banyak terpengaruh oleh sosiologi, ruang lingkupnya lebih luas dan lebih dinamis daripada pendekatan institusional karena memperhatikan proses.

Ketiga, Keputusan (*decision*) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah Pengambilan Keputusan (*decision making*) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara bersamaan (kolektif) dan yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dan menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih di antara beberapa alternatif, yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah.

Keempat, Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Pandangan yang menekankan aspek kebijaksanaan umum menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah.

Kelima, Pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*) adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat. Pandangan yang menekankan pada pembagian dan alokasi melihat politik sebagai kegiatan membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Menurut pandangan ini, tidak meratanya pembagian nilai dapat menyebabkan konflik. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga, dan sebagainya. Nilai dapat bersifat abstrak, seperti kejujuran, kebebasan berpendapat, kebebasan mimbar, dan sebagainya. Nilai juga dapat bersifat konkret/nyata (*material*) seperti rumah, kekayaan, dan sebagainya.

Dari berbagai pandangan tentang politik, umumnya ahli politik cenderung melihat politik sebagai suatu kemahiran, sehingga dalam kaitannya dengan ilmu politik berarti ilmu dan kemahiran dalam bidang kenegaraan. Ilmu tentang seni memerintah. Meskipun demikian, berbagai macam pendefinisian tentang ilmu politik, seperti Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari sifat dan tujuan negara, ilmu yang menyelidiki lembaga-

lembaga politik, ilmu yang menitikberatkan penyelidikannya dari statika ke dinamika politik, ilmu mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum, dan pendefinisian menurut hakikat politik adalah suatu ilmu yang mempelajari masalah kekuasaan.

C. SOSIOLOGI POLITIK

Sosiologi politik pada dasarnya merupakan suatu kajian yang mencoba menghubungkan antara ilmu sosiologi dengan ilmu politik. Misalnya, secara teori maupun konsep dalam ilmu sosiologi menekankan pada aspek struktur dan hubungan sosial, dan dalam ilmu politik menekankan pada aspek kekuasaan, maka sosiologi politik mencoba menghubungkan kedua aspek tersebut ke dalam suatu kajian. Dalam hubungan ini Isjwara (1982), mengemukakan bahwa “sosiologi politik adalah bagian dari sosiologi yang menganalisis proses-proses politik dalam rangka dasar sosiologi menitikberatkan pada dinamika tingkah laku politik, sebagaimana tingkah laku itu dipengaruhi oleh berbagai proses sosial, seperti kerja sama, persaingan, konflik, dan lain-lain”.

Menurut Bottommore (1983), sosiologi politik menaruh perhatian terhadap masalah kekuasaan. Adapun objek utama sosiologi politik adalah dan seharusnya, fenomena kekuasaan di tingkat masyarakat yang inklusif (baik masyarakat itu merupakan suku, negara, kerajaan, ataupun jenis lainnya); hubungan-hubungan di antara masyarakat-masyarakat tersebut; dan gerakan-gerakan sosial, organisasi, dan lembaga yang secara langsung terlibat dalam penentuan kekuasaan tersebut. Karena dalam suasana inilah kekuasaan nampak dalam bentuknya yang paling murni dan jelas, dan hanya dari sudut pandang inilah segala manifestasinya dalam berbagai bentuk dapat dipahami secara optimal.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Duverger (1993) mengemukakan bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando, di dalam semua masyarakat manusia, bukan saja di dalam masyarakat nasional. Konsepsi ini berasal dari perbedaan antara yang memerintah (*governants*) dan yang diperintah (*governes*). Setiap kelompok masyarakat dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang sifatnya cuma sekejap mata saja sampai kepada yang paling stabil, ada orang yang memerintah dan mereka mematuhi, mereka yang memberikan perintah

dan mereka yang mentaatinya, mereka yang membuat keputusan dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Pertanyaan kemudian muncul, di mana letak persamaan dan perbedaan antara ilmu politik dengan sosiologi politik? Menurut Bandix dan Lipset dalam Sulistyو (1990), jika dilakukan perbandingan, maka akan terlihat: (a) keduanya membahas distribusi dan olahan (*exersice*) kekuasaan di masyarakat; (b) ilmu politik melakukan pemilihan kelembagaan bagi distribusi dan olahan kekuasaan, sedangkan sosiologi politik tidak. Sosiologi politik menganggap hal ini sebagai sesuatu yang memang sudah ada (*given state*); (c) pembahasan dalam ilmu politik mulai dengan negara dan menguji bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, sedangkan sosiologi politik beranjak dari titik pijak sebaliknya, yaitu mulai dengan masyarakat dan menguji pengaruhnya terhadap negara (pemerintah).

Dari gambaran yang dikemukakan Bandix dan Lipset tersebut, Sulistyو mengemukakan bahwa rumusan pembahasan sosiologi politik adalah mengkaji hubungan kekuasaan dan struktur masyarakat. Kemudian fokus kajian sosiologi politik mulai memperoleh penajaman, dengan telaahan tentang bagaimana persoalan sosial mempengaruhi proses politik, atau melihat persoalan-persoalan politik dengan sudut pandang masyarakat.

Selanjutnya, pada bagian lain Sulistyو mengemukakan bahwa untuk kepentingan pengajaran, ada beberapa topik yang relatif selalu muncul di berbagai buku teks sosiologi politik berdasarkan beberapa kesamaan yang relatif sama, yaitu; demokrasi, bentuk kekuasaan (oligarki), *struktur kekuasaan-masyarakat industri*, *partisipasi politik*, dan *struktur kekuasaan-masyarakat berkembang*.

Pertama, Demokrasi. Pembahasan tentang demokrasi agaknya tak banyak berbeda dengan yang pada umumnya dilakukan dalam kajian ilmu politik. Tetapi, *sosiologi politik menekankan pembahasannya pada keterkaitan antara bentuk-bentuk dan tipe demokrasi dengan masyarakat atau komunitas yang menyelenggarakannya.* Dengan demikian, pembahasan ditelusuri melalui sejarah pemikiran sejak “demokrasi Yunani yang ditetapkan di Athena pada sekitar abad ke-5 SM, sampai penafsirannya pada masa modern. Karena kajian terkait pada struktur masyarakat yang menerapkan “konsep demokrasi” tersebut, maka pembahasan sosiologi politik berkepentingan, misalnya untuk *mengajukan pertanyaan-pertanyaan: bagaimana penafsiran tentang “demokrasi” oleh suatu masyarakat? mengapa konsep yang relatif berhasil di suatu masyarakat, sementara di*

masyarakat yang lain mengalami kegagalan? apakah terdapat struktur tertentu yang membedakan tingkat keberhasilan demokrasi? dan sebagainya.

Kedua, Oligarki. Ini merupakan tipe klasik suatu bentuk kekuasaan. dalam konteks negara modern, tipe klasik atau pengertian-pengertian dasar dari bentuk-bentuk kekuasaan seperti tirani dan oligarki, sudah tidak ada lagi. Penyebabnya, pada sistem pemerintahan negara modern telah ada peluang bagi sedikit orang untuk memberontaknya. Namun, topik mengenai oligarki dan kaitannya dengan struktur masyarakat yang membentuknya akan dapat membantu pemahaman atas perbedaan tipe-tipe pemerintahan lainnya maupun demokrasi yang dijalankan oleh masyarakat tersebut.

Ketiga, Struktur kekuasaan-masyarakat industri. Di lihat dari lokus (tempat)-nya, *struktur kekuasaan pada masyarakat industri dapat dihipotesiskan dengan dua pendekatan*, yaitu: (a) *pendekatan elitis*, yang berasumsi bahwa *locus* kekuasaan sesungguhnya di tangan kaum elite masyarakat; (b) *pendekatan pluralis*, yang beranggapan bahwa *locus* tersebut ada di masyarakat. Hal ini dapat diukur antara lain dari derajat pengaruh dan tingkat kepolitikannya.

Keempat, Partisipasi. Jika pengertian partisipasi politik semata-mata ditekankan pada aspek-aspek keikutsertaan dalam mempengaruhi proses pembuatan keputusan, maka jenis dan sifat partisipasi menjadi kurang penting untuk menjadi kategori pembeda. Dengan kata lain, suatu partisipasi politik tidak selalu harus dilihat sebagai keikutsertaan secara positif. Berbagai tindakan yang bersifat pasif - seperti kasus Golput (Golongan putih) yang muncul sebagai fenomena penolakan untuk ikut pemilu sejak tahun 1971 dan seterusnya - juga dianggap sebagai bagian dari partisipasi politik. Bahkan tindakan-tindakan yang destruktif, seperti teror, juga dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik, selama tindakan tersebut dinilai berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusan.

Kelima, Struktur kekuasaan-masyarakat berkembang. Struktur kekuasaan di negara berkembang, dan kaitannya dengan struktur masyarakat yang membentuknya, harus dihipotesiskan melalui pemahaman atas asal, sifat, dan konsep kekuasaan itu sendiri, serta pelaksanaan yang sesungguhnya. Berbagai pendekatan kultural maupun struktural dapat dan sering dipergunakan untuk menyusun tipologi kekuasaan. Misalnya, yang secara luas dikenal dalam pengajaran sosiologi ialah tipologi kepemimpinan yang disusun oleh Weber. Jika di Indonesia dipakai sebagai bahan rujukan, dan kesamaan tipe yang ditemui pada berbagai sistem politik di negara

berkembang lainnya, cukup banyak kepustakaan mengenai hal ini. Termasuk di dalamnya apa yang disebut sebagai “sosiologi militer” yang memfokuskan kajian pada keterlibatan militer dalam politik.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian masyarakat dan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian tersebut!
- 2) Jelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian politik!
- 3) Jelaskan pengertian politik sesuai hakikat politik!
- 4) Jelaskan fokus kajian sosiologi politik.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang mempunyai unsur-unsur: hidup bersama, bercampur untuk waktu yang lama, merupakan suatu kesatuan dan sistem hidup bersama.
- 2) Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam pengertian politik mencakup: negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian. Anda dapat mengkaji ulang pendapat Miriam Budiardjo tentang unsur-unsur pokok politik.
- 3) Pendefinisian menurut hakikat politik adalah suatu ilmu yang mempelajari masalah kekuasaan.
- 4) Fokus kajian sosiologi politik menyangkut telaahan tentang bagaimana persoalan sosial mempengaruhi proses politik, atau melihat persoalan-persoalan politik dengan sudut pandang masyarakat.



RANGKUMAN

Istilah sosial umumnya digunakan untuk menunjuk objeknya yaitu masyarakat. Pengertian masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang mempunyai unsur-unsur seperti: hidup bersama, bercampur untuk

waktu yang cukup lama, merupakan suatu kesatuan, dan sistem hidup bersama. Pemusatan perhatian pada unsur-unsur kemasyarakatan secara keseluruhan, seperti; struktur sosial, interaksi sosial, organisasi atau kelompok-kelompok sosial, dan sebagainya, merupakan kajian ilmu sosiologi. Kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan, seperti; memperjuangkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan menggunakan kekuasaan dipelajari dalam ilmu politik.

Politik itu sendiri cenderung diartikan sebagai suatu kemahiran politik dalam hubungannya dengan masalah-masalah kenegaraan. Meskipun demikian, berbagai pandangan tentang arti dari politik, seperti; negara dipandang sebagai inti dari politik; kekuasaan dipandang sebagai inti dari politik; politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum; politik berkaitan dengan kebijaksanaan umum; dan politik adalah berkaitan dengan masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.

Kajian yang berusaha menghubungkan antara ilmu sosiologi dan ilmu politik adalah sosiologi politik. Jika dalam ilmu sosiologi menekankan pada aspek struktur dan hubungan masyarakat, dan ilmu politik menekankan pada aspek kekuasaan, maka sosiologi politik mencoba menghubungkan kedua aspek tersebut, atau mengkaji hubungan antara kekuasaan dengan struktur masyarakat. Meskipun demikian, fokus kajian sosiologi politik mulai memperoleh penajaman, dengan telaahan bagaimana persoalan sosial mempengaruhi proses politik, atau melihat persoalan-persoalan politik dari sudut pandang masyarakat.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Istilah sosial (*social*) dalam ilmu-ilmu sosial umumnya digunakan untuk menunjuk objeknya pada
 - A. masyarakat (*society*)
 - B. komunitas
 - C. kelompok sosial
 - D. kesatuan sosial
- 2) Berikut ini unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian masyarakat mencakup, *kecuali*
 - A. manusia hidup bersama
 - B. bercampur untuk waktu lama

- C. terikat satu sama lain
 - D. merupakan sistem hidup bersama
- 3) Kajian yang fokus analisisnya pada masyarakat adalah
- A. Ilmu politik
 - B. Ilmu sosiologi
 - C. Psikologi sosial
 - D. Dinamika sosial
- 4) Secara etimologis istilah politik diartikan sebagai
- A. kekuasaan
 - B. kebijaksanaan
 - C. distribusi
 - D. kemahiran
- 5) Secara hakiki istilah politik diartikan sebagai
- A. kekuasaan
 - B. kebijaksanaan
 - C. distribusi
 - D. kemahiran
- 6) Pandangan yang menekankan arti politik sebagai pemerataan nilai-nilai dalam masyarakat adalah
- A. kekuasaan
 - B. kebijaksanaan
 - C. distribusi
 - D. kemahiran
- 7) Kajian yang fokus analisisnya pada aspek kekuasaan dan struktur masyarakat, adalah....
- A. Ilmu politik
 - B. Ilmu sosiologi
 - C. Sosiologi politik
 - D. Komunikasi politik
- 8) Sosiologi politik adalah bagian dari kajian
- A. politik
 - B. sosiologi
 - C. psikologi
 - D. proses sosial

- 9) Salah satu persamaan kajian ilmu politik dengan sosiologi politik, antara lain adalah....
- A. kekuasaan
 - B. strata sosial
 - C. proses sosial
 - D. proses politik
- 10) Tindakan yang bersifat pasif seperti kasus Golput, bahkan terror, dapat dikategorikan sebagai
- A. dinamika politik
 - B. demokrasi politik
 - C. partisipasi politik
 - D. komunikasi politik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Konsep Kekuasaan Sosial Politik

Setelah Anda memahami konsep-konsep dasar seperti dijelaskan pada Kegiatan Belajar 1, maka pada Kegiatan Belajar 2 ini Anda akan mempelajari konsep kekuatan politik. Uraian dimulai dengan menjelaskan konsep kekuasaan.

Konsep ini berkaitan erat dengan konsep kekuatan, karena kekuatan merupakan gejala sosial yang biasa dilakukan melalui penggunaan kekuasaan berupa pemaksaan kehendak suatu kelompok kepada pihak lain. Kemudian dijelaskan mengenai konsep kekuasaan sosial, yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan kemampuan dalam hubungan-hubungan dan proses-proses sosial. Selanjutnya, pada bagian lain dalam Kegiatan Belajar 2 ini, dijelaskan pula salah satu bentuk kekuasaan sosial yang sangat penting yaitu kekuasaan politik, baik yang terwujud dalam negara maupun yang ditujukan kepada negara.

A. KONSEP KEKUASAAN

Dalam literatur ilmu politik konsep kekuasaan berkaitan erat dengan konsep *kekuatan*. Keterkaitan kedua konsep ini, menurut Isjwara (1982), karena kekuatan diartikan sebagai *gejala sosial, sebagai kekuasaan fisik*, sebagai kekuasaan yang *disertai dengan kekerasan* atau *daya-paksa fisik* ataupun *ancaman-ancaman fisik* lainnya. Kekuasaan tidak selalu berupa kekuatan, walaupun sekali-kali kekuasaan dapat juga mengambil bentuk kekuatan, yakni bentuk kekuasaan yang disebut *“naked power”*. Kekuasaan dalam arti tertentu adalah *kekuatan yang disetujui*. Adanya kekuasaan dalam berbagai manifestasinya, termasuk kekuatan harus diterima oleh umat manusia, karena manusia menurut kodratnya ditakdirkan untuk hidup berkelompok. Manusia ditakdirkan oleh hakikatnya sebagai makhluk sosial, untuk menerima adanya penyelenggaraan kekuasaan, sekalipun penyelenggaraan itu didasarkan atas kekuatan belaka.

Menurut Isjwara *asal mula terbentuknya negara sesuai “Teori Kekuatan”*, adalah *hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah*. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis

yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan negara. *Negara merupakan resultante positif dari sengketa dan penaklukan*. Dalam teori kekuatan, faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal dan terutama yang menimbulkan negara. Kekuatan (*force*) menjadi sumber pencipta negara-negara. *Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan dan yang keluar sebagai pemenang* adalah pembentuk negara itu, dan sebagainya.

Kita kembali kepada konsep kekuasaan. Istilah ini diartikan sebagai kesanggupan seseorang individu atau suatu kelompok sosial guna melanjutkan suatu bentuk tindakan (membuat dan melaksanakan keputusan, dan secara lebih luas lagi, menentukan agenda pembuatan keputusan), jika perlu menentang kelompok kepentingan, dan bahkan oposisi serta individu lainnya (Bottomore, 1983). Adapun Max Weber dalam Giddens (1986) mendefinisikan kekuasaan sebagai *kemungkinan bahwa seseorang pelaku akan mampu untuk mewujudkan gagasan-gagasannya sekalipun ditentang oleh orang lain, dengan siapa dia berada dalam hubungan sosial*.

Menurut Budiardjo (1983), *sumber kekuasaan terdapat dalam pelbagai segi*. Dia dapat bersumber pada *kekerasan fisik* (misalnya, seorang polisi dapat memaksa penjahat untuk mengakui kejahatannya karena dari segi persenjataan polisi lebih kuat); dapat juga bersumber pada *kedudukan* (misalnya, seorang komandan terhadap bawahannya, seorang menteri dapat memecat pegawainya yang korupsi atau memutasikannya ke tempat lain); pada *kekayaan* (misalnya, seorang pengusaha dapat mempengaruhi politikus melalui kekayaannya); atau pada *kepercayaan* (misalnya, seorang pendeta terhadap umatnya); dan lain-lain.

Berhubungan erat dengan masalah kekuasaan adalah *pengaruh* (*influence*), sehingga sering dikatakan bahwa pengaruh adalah bentuk lunak dari kekuasaan. Dalam hal ini biasanya seorang yang mempunyai kekuasaan juga mempunyai pengaruh di luar dan di dalam bidang kekuasaannya. Tapi tidak semua orang yang mempunyai kekuasaan yang sama, mempunyai pengaruh yang sama besarnya karena *masalah pengaruh berkaitan dengan pribadi seseorang yang memegang kekuasaan*. Misalnya, kekuasaan Lurah A sama dengan kekuasaan Lurah B, tetapi pengaruh Lurah A belum tentu sama besarnya dengan pengaruh Lurah B di lingkungan penduduknya masing-masing. Selain itu pengaruh juga tidak selalu harus dikaitkan dengan kekuasaan sebab ada orang yang tidak mempunyai kedudukan (yang dengan

sendirinya tidak mempunyai kekuasaan) tapi mempunyai pengaruh. Jadi arti pengaruh tidak sama dengan kekuasaan.

Selain pengaruh, Weber mengemukakan adanya *konsepsi dominasi lebih khusus*. Konsepsi ini hanya mengacu kepada *kasus-kasus pemaksaan kekuasaan*, di mana seorang *pelaku menuruti suatu perintah spesifik yang dikeluarkan oleh orang lain*. Penerimaan dominasi bisa terletak pada pelbagai *motif yang berlainan*, terentang mulai dari *kebiasaan semata-mata sampai penggalangan keuntungan pribadi*. Akan tetapi, kemungkinan untuk memperoleh hadiah-hadiah material dan kehormatan sosial, merupakan dua bentuk yang paling meresap dari ikatan yang mengikat pemimpin dan pengikut. Namun tidak ada dominasi yang stabil, semata-mata di atas kebiasaan yang otomatis ataupun atas himbauan kepada kepentingan pribadi: penyangga utamanya adalah kepercayaan dari pihak bawahan atas keabsahan kedudukan mereka sebagai bawahan.

Weber membedakan *tiga jenis ideal dari keabsahan*, yang bisa meletakkan suatu pola hubungan dominasi: *tradisional*, menurut *hukum*, dan *kharismatis*. Dominasi *tradisional berlandaskan atas kepercayaan kepada kesucian aturan-aturan yang telah berabad-abad lamanya*. Contoh: dalam komunitas pedesaan otoritas biasanya dipegang oleh orang-orang yang paling tua karena dipandang paling meresapi kearifan tradisional. *Dominasi menurut hukum berlandaskan pada aturan formal yang ditetapkan*. Contoh: bawahan harus taat pada atasannya, bukan karena mereka menerima norma-norma yang bersifat pribadi, tetapi mereka tunduk kepada atasan sebagai pemegang otoritas sesuai aturan hukum. *Dominasi kharismatis berlandaskan kepada suatu sifat tertentu dari suatu kepribadian seorang individu yang dianggap luar biasa dan diperlakukan sebagai seorang yang mempunyai sifat-sifat unggul atau paling sedikit dengan kekuatan-kekuatan yang khas dan luar biasa*.

Selanjutnya, untuk mewujudkan kekuasaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Allen dalam Isjwara (1982) menggolongkan teknik *kekuasaan dalam tiga jenis*, yaitu: (1) teknik yang tradisional atau historis; (2) teknik yang modern; dan (3) teknik yang bersifat destruktif.

Pertama, Teknik yang tradisional. Dengan teknik-teknik pelaksanaan kekuasaan tradisional dimaksudkan semua teknik yang bisa dipergunakan dalam sejarah. Termasuk dalam golongan teknik yang tradisional ini seperti; kekuatan atau paksaan semata, intimidasi, insinuas, ketakutan, hukuman, penaklukan, memecah belah dan menguasai, dan sebagainya.

Kedua, Teknik yang modern. Teknik-teknik ini dianggap modern karena ternyata bahwa teknik-teknik itu pada dua puluh tahun akhir-akhir ini lebih banyak dipergunakan dan lebih efektif hasil-hasilnya daripada segenap teknik-teknik tradisional. Ada lima teknik yang tergolong ke dalam teknik yang modern ini, yaitu: a. *propaganda yang diadakan secara sadar*, b. pengawasan atas pendidikan yang direncanakan dengan teliti, c. memupuk ide superioritas ras, d. pemberitaan terang-terangan dari penyelenggaraan keganasan-keganasan massal, dan e. pengulangan sampai bertele-tele dari ajaran bahwa tujuan membenarkan alat. Dari kelima teknik modern tersebut, dua di antaranya pada akhirnya akan mengakibatkan kehancuran pelaksanaan-pelaksanaannya, yaitu teknik pemberitaan terang-terangan dari penyelenggaraan keganasan-keganasan massal, dan teknik pengulangan sampai bertele-tele dari ajaran bahwa tujuan membenarkan alat.

Ketiga, Teknik yang destruktif. Teknik-teknik ini unik dan berlainan daripada dua teknik-teknik tersebut (teknik tradisional dan modern). Termasuk sebagai teknik-teknik yang destruktif ialah: a. dusta, b. ide tentang adanya “*universality of choice*”, dan c. illusi akan kemenangan.

B. KEKUASAAN SOSIAL

Kekuasaan sosial (*social power*) adalah salah satu bentuk dari konsep sosiologis yang disebut “*social control*”.

Tujuan dari kontrol sosial adalah untuk mendisiplinkan para anggota kelompok terhadap aturan atau norma-norma kelompok. Ossip K. Flechtheim dalam Budiardjo (1983) mengemukakan bahwa “*kekuasaan sosial adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain ... untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan*”. Robert M. MacIver mengemukakan bahwa “*kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia*”. Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial.

Selanjutnya, Budiardjo mengemukakan bahwa *kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (relationship)*, dalam arti bahwa ada *satu pihak yang memerintah* dan ada *pihak yang diperintah (the ruler and the ruled)*. Tidak ada *persamaan martabat*, selalu yang satu lebih tinggi daripada yang lain

dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan. Pelaksanaan tidak selalu perlu dipakai secara gamblang, tetapi adanya kemungkinan paksaan itu dipakai, sering sudah cukup.

Setiap manusia sekaligus merupakan subjek dari kekuasaan dan objek dari kekuasaan. Contoh: seorang presiden membuat undang-undang (subjek dari kekuasaan), tetapi di samping itu dia juga harus tunduk kepada undang-undang (objek dari kekuasaan). Pokoknya jarang sekali ada orang yang tidak pernah memberi perintah dan tidak pernah menerima perintah. Hal ini kelihatan jelas dalam organisasi militer yang bersifat hierarkis di mana seorang prajurit diperintah oleh komandannya, sedangkan komandan ini diperintah pula oleh atasannya.

Robert M. Mac Iver seperti disebut sebelumnya melihat kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramida. Ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul daripada lainnya, hal mana berarti bahwa yang satu lebih kuat dengan jalan mensubordinasikan kekuasaan lainnya itu. Atau dengan perkataan lain struktur piramida kekuasaan itu terbentur oleh kenyataan dalam sejarah masyarakat, bahwa golongan yang berkuasa (dan yang memerintah) itu relatif selalu lebih kecil jumlahnya daripada golongan yang dikuasai (dan yang diperintah).

Dalam hubungan dengan kelompok-kelompok sosial, Peter M. Blau dalam Polama (1987) mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain, walaupun terdapat penolakan melalui perlawanan, baik dalam bentuk pengurangan pemberian ganjaran secara teratur maupun dalam bentuk penghukuman, sejauh kedua hal itu ada, dengan melakukan sanksi negatif”.

Menurut Blau hanya perintah-perintah kekuasaan sah yang dapat dipatuhi. *Istilah lain dari kekuasaan yang sah adalah otoritas*. Kelompok secara sukarela bersedia menerima kekuasaan atau otoritas yang sah, dengan demikian membuat wewenang tersebut sebagai pengikat anggota-anggota kelompok.

Apakah kekuasaan akan cenderung memperoleh keabsahan atau oposisi sebagian tergantung pada apakah ukuran atau nilai-nilai yang mengatur hubungan-hubungan sosial dengan kelompok bersifat khusus atau umum. *Ukuran yang bersifat khusus menurut Blau menunjuk pada atribut-atribut status yang hanya dinilai oleh in-group, seperti kepercayaan politik atau keagamaan, sedangkan ukuran-ukuran yang bersifat umum menunjuk kepada*

atribut-atribut yang biasanya dinilai, oleh orang yang tidak memiliki maupun yang memiliki kekayaan atau kompetensi.

Sebuah ilustrasi dikemukakan oleh Blau, bahwa sampai bulan Januari 1973 permohonan untuk abortus di sebagian negara bagian Amerika Serikat tetap dilarang. Larangan ini dapat dilihat sebagai suatu *nilai umum* yang didukung oleh hukum. Tetapi ada kekuatan-kekuatan tertentu yang bergerak untuk mengubah situasi yang sah ini. Dua yang terpenting di antara kekuatan-kekuatan itu ialah *gerakan kaum wanita* serta keprihatinan terhadap *ledakan penduduk dunia* yang sedang mengalami kekurangan sumber daya. Tindakan kekuatan-kekuatan tersebut dianggap melawan hukum, dan pada tahap itulah berlangsung pertentangan antara dua kelompok dengan sistem nilai yang saling bertentangan: yaitu mereka yang menginginkan undang-undang abortus, dan mereka yang menolak abortus, seperti kelompok Pendukung Hak Kelahiran dan Hak untuk Hidup. Oposisi terus berlangsung ketika amandemen diketengahkan untuk menghentikan abortus yang sah.

Selanjutnya, Blau mengemukakan bahwa *dinamika kehidupan sosial yang terorganisir, bersumber dari kekuatan-kekuatan penantang*. Kekuasaan individu-individu yang dominan dapat dilaksanakan secara moderat dan adil, sehingga orang lain merasa beruntung untuk tetap berada di bawah perlindungan pengaruh mereka. Akan tetapi kekuasaan juga dapat menjurus pada penghisapan. Bilamana orang terpaksa tunduk pada kekuasaan yang bersifat menghisap dan tidak adil, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan oposisi yang menantang kekuasaan yang dominan. Di sinilah kita melihat bibit-bibit perkembangan konflik, ketika nilai-nilai yang sah berhadapan dengan cita-cita oposisi.

Blau mengemukakan bahwa dalam kehidupan sosial terdapat banyak kekuatan kontradiktoris yang dikenal sebagai dialektika. Resiprositas (*reciprocity*) adalah kekuatan yang mampu menimbulkan keseimbangan struktur sosial, akan tetapi adalah suatu paradok bahwa “resiprositas yang terjadi di tingkat tertentu dapat menciptakan ketidakseimbangan di tingkat lain”. Oleh karena itu kekuatan-kekuatan sosial tersebut dapat dikatakan memiliki berbagai implikasi yang bersifat kontradiktoris. Proses ini dapat digambarkan oleh usaha membenarkan tindakan yang salah, misalnya tekanan terhadap kelompok minoritas dalam suatu masyarakat. Bilamana anggota kelompok minoritas (misalnya negro atau kaum wanita) memperoleh perlakuan istimewa dalam promosi jabatan atau pekerjaan maka hal ini dapat menyebabkan berkembangnya oposisi yang serius di antara anggota

kelompok mayoritas yang sedang bersaing untuk memperoleh sumber-sumber yang langka itu. Usaha yang terus-menerus dilakukan untuk mendepak kaum wanita atau negro itu dari segmen angkatan kerja akan menjurus pada lahirnya oposisi dari berbagai kolektivitas yang memiliki kepentingan-kepentingan kelompok minoritas.

C. KEKUASAAN POLITIK

Di antara banyak kekuasaan suatu bentuk kekuasaan yang penting adalah kekuasaan politik. Dalam hubungan ini, Talcot Parson dalam Bottomore (1983) mengemukakan bahwa “kekuasaan adalah kapasitas umum untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit di dalam suatu sistem organisasi kolektif ketika kewajiban-kewajiban itu diabsahkan sehubungan dengan sikap mereka demi mencapai tujuan bersama. Dalam definisi ini, kekuasaan diartikan sebagai wewenang yang sah, dan wewenang ini sendiri dianggap berasal dari kesepakatan saling mengisi demi tujuan bersama.

Budiardjo (1983) memberikan definisi kekuasaan politik sebagai “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri”. Kekuasaan politik merupakan sebagian saja dari kekuasaan sosial, yakni kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administrasi, legislatif, dan yudikatif.

Menurut Budiardjo, suatu kekuasaan politik tidaklah mungkin tanpa penggunaan kekuasaan (*machtsuitoefening*). Kekuasaan itu harus digunakan dan dijalankan. Apabila penggunaan kekuasaan itu berjalan dengan efektif, hal ini dapat disebut sebagai “kontrol” (penguasaan/pengendalian). Dengan sendirinya untuk menggunakan kekuasaan politik yang ada penguasa yaitu pelaku yang memegang kekuasaan, dan harus ada alat/sarana kekuasaan (*machtsmiddelen*) agar penggunaan kekuasaan itu dapat dilakukan dengan baik. Pada kebanyakan negara-negara baru di mana kesetiaan lokal (*primordial attachment*) tampak masih lebih kuat dibandingkan dengan

kesetiaan nasional, serta banyak suku, golongan, dan aliran, maka soal keabsahan (*legitimacy*) perlu digalang. Keabsahan adalah konsep bahwa kedudukan seseorang atau sekelompok penguasa diterima baik oleh masyarakat, karena sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang berlaku dan dianggap wajar.

Selanjutnya, Budiardjo mengemukakan bahwa Ossip K. Flechtheim membedakan dua macam kekuasaan politik, yaitu: (a) bagian dari kekuasaan sosial yang khususnya terwujud dalam negara (kekuasaan negara atau *state power*), seperti lembaga-lembaga pemerintahan, DPR, Presiden, dan sebagainya, (b) bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara. Yang dimaksud ialah aliran-aliran dan asosiasi-asosiasi baik yang jelas-jelas bersifat politik (seperti misalnya partai politik), maupun yang pada dasarnya tidak tetapi pada saat-saat tertentu mempengaruhi jalannya pemerintahan, yaitu organisasi ekonomi, organisasi mahasiswa, organisasi agama, organisasi minoritas, dan sebagainya.

Kekuasaan politik antara satu negara dengan negara lainnya berbeda. Contoh; di Indonesia, terutama di masa lampau, banyak organisasi wanita merupakan kekuatan politik. Di Filipina dan Jepang biasanya tidak bersifat politik; begitu pula organisasi keserjanaan, organisasi pemuda, dan sebagainya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan keterkaitan antara konsep kekuasaan dengan konsep kekuatan!
- 2) Jelaskan konsep dominasi dan pola hubungan dominasi!
- 3) Jelaskan berbagai teknik untuk mewujudkan kekuasaan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Keterkaitan antara konsep kekuasaan dengan konsep kekuatan politik adalah kekuatan diartikan sebagai kekuasaan fisik, sebagai kekuasaan yang disertai dengan kekerasan atau daya paksa fisik. Di samping itu kekuasaan dalam arti tertentu merupakan kekuatan yang disetujui.

- 2) Konsep dominasi mengacu kepada kasus-kasus pemaksaan kekuasaan di mana seorang pelaku menurut suatu perintah spesifik yang dikeluarkan oleh orang lain. Terdapat tiga pola hubungan dominasi yaitu dominasi tradisional yang berlandaskan pada kepercayaan-kepercayaan, dominasi menurut hukum berlandaskan pada aturan formal yang ditetapkan; dan dominasi kharismatis yang berlandaskan kepada suatu sifat tertentu atau kekuatan-kekuatan yang khas dan luar biasa. Untuk jelasnya dapat Anda pelajari kembali sub topik konsep kekuasaan.
- 3) Teknik-teknik untuk mewujudkan kekuasaan dapat digolongkan dalam tiga jenis, yaitu:
 - teknik yang tradisional atau historis,
 - teknik modern, dan
 - teknik yang bersifat destruktif.



RANGKUMAN

Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Konsep ini erat kaitannya dengan konsep kekuatan, karena kekuasaan dalam arti tertentu adalah kekuatan yang disetujui. Berkaitan dengan kekuasaan, konsepsi dominasi lebih khusus, yaitu mengacu pada kasus-kasus pemaksaan kekuasaan. Terdapat tiga pola hubungan dominasi, yaitu; dominasi tradisional berlandaskan atas kepercayaan-kepercayaan, dominasi menurut hukum berlandaskan pada aturan formal yang ditetapkan, dan dominasi kharismatis berlandaskan pada sifat-sifat khusus atau kekuatan-kekuatan yang khas dan luar biasa. Untuk mewujudkan kekuasaan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: teknik tradisional, teknik modern, dan teknik destruktif.

Dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat, kekuasaan sosial adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan dan proses sosial yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain, atau kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial. Di antara banyak kekuasaan suatu bentuk kekuasaan yang dipandang penting adalah kekuasaan politik. kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya. Kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang terwujud dalam negara dan yang ditujukan kepada negara. Kekuasaan

politik tidak hanya menyangkut pengendalian ketaatan warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian tindakan atau aktivitas negara, baik pada bidang administratif, legislatif, maupun pada bidang yudikatif.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kekuasaan dalam arti tertentu adalah
 - A. kekuatan yang disetujui
 - B. kekerasan
 - C. kekuasaan fisik
 - D. gejala sosial
- 2) Konsep kekuasaan berkaitan erat dengan konsep
 - A. pemaksaan
 - B. kekerasan
 - C. kekuatan
 - D. penolakan
- 3) Konsepsi lain yang berkaitan dengan konsep kekuasaan adalah
 - A. kekuatan
 - B. dominasi
 - C. ancaman
 - D. kekuasaan fisik
- 4) Terdapat tiga jenis ideal keabsahan yang bisa meletakkan pola hubungan dominasi, *kecuali* dominasi
 - A. tradisional
 - B. menurut hukum
 - C. kharismatis
 - D. destruktif
- 5) Untuk mewujudkan kekuasaan dapat dilakukan melalui tiga cara, *kecuali* teknik....
 - A. tradisional
 - B. modern
 - C. berdasarkan hukum
 - D. bersifat destruktif

- 6) Keseluruhan kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain, termasuk dalam bentuk kekuasaan
 - A. sosial
 - B. politik
 - C. fisik
 - D. tradisional
- 7) Kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, termasuk dalam bentuk kekuasaan
 - A. sosial
 - B. politik
 - C. fisik
 - D. tradisional
- 8) Kekuasaan dapat bersumber dari berbagai aspek berikut, *kecuali*
 - A. kekerasan
 - B. kedudukan
 - C. kepercayaan
 - D. penghisapan
- 9) Kekuasaan politik tidak hanya mencakup pengendalian warga masyarakat, tetapi juga mencakup pengendalian aktivitas lembaga
 - A. negara
 - B. sosial
 - C. masyarakat
 - D. ekonomi
- 10) Berikut ini kekuasaan politik yang merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara antara lain, *kecuali*
 - A. partai politik
 - B. organisasi ekonomi
 - C. organisasi mahasiswa
 - D. lembaga pemerintah

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Organisasi Kekuatan Sosial Politik

Kekuatan sosial politik dalam literatur ilmu politik seperti yang dikemukakan oleh R. Wiyono (1982) adalah sama dengan apa yang diartikan dengan partai politik. Oleh karena itu pada Kegiatan Belajar 3 ini, Anda akan mempelajari kekuatan sosial politik dalam arti *partai politik*. Penjelasan mengenai partai politik dikaitkan dengan gerakan dari kelompok-kelompok sosial. Hal ini penting untuk Anda pahami, karena gerakan sosial merupakan suatu sarana dari anggota-anggota masyarakat untuk dapat mengungkapkan ketidaksetujuan dan oposisi secara tidak langsung. Sebaliknya, partai politik merupakan sarana yang sangat diperlukan demi mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya, pada bagian lain dalam Kegiatan Belajar 3 ini, akan dijelaskan berbagai fungsi dari partai politik, seperti; fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, seleksi politik, pemaduan politik, memperjuangkan kepentingan politik, komunikasi politik, dan fungsi pengawasan politik.

A. GERAKAN SOSIAL DAN PARTAI POLITIK

Gerakan sosial dalam artian luas adalah suatu usaha bersama untuk meningkatkan atau menentang perubahan dalam masyarakat di mana usaha tersebut memainkan peran. Tetapi pernyataan ini menurut Bottomore perlu dibatasi sedemikian rupa, jika kita ingin memperoleh suatu perbedaan tegas antara “gerakan” dengan “partai”. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan menunjuk sifat yang kurang terorganisasi dari suatu gerakan, di mana dalam gerakan tersebut mungkin tidak ada keanggotaan tetap atau keanggotaan yang mudah dikenal (tidak ada “kartu partai” atau masa waktu), dan tidak memiliki jalur staf pusat (Bottomore, 1983).

Yang tergolong ke dalam suatu gerakan menurut Bottomore lebih merupakan satu kelompok yang bersimpati terhadap pandangan sosial atau doktrin tertentu, yang menampakkan dirinya dalam perdebatan politik sehari-hari dan yang karenanya siap berperan serta di dalam kegiatan-kegiatan seperti demonstrasi. Bottomore menegaskan bahwa bilamana formasi-formasi politik yang terorganisasi seperti partai misalnya dilibatkan dalam perjuangan merebut kekuasaan, dalam artian untuk menguasai atau merebut

kekuasaan unit politik tertentu, maka gerakan-gerakan sosial akan bertindak dalam cara yang lebih menyatu dan jika mereka berhasil membangun prasyarat bagi perubahan-perubahan *policy* atau rezim dengan mempermasalahkan keabsahan sistem politik yang ada (sebagian atau seluruhnya), dengan menciptakan iklim pendapat yang berbeda, dan dengan mengajukan alternatif.

Bottomore selanjutnya, mengemukakan bahwa terdapat tiga fase utama di dalam perkembangan gerakan-gerakan sosial modern. *Tahap yang pertama*, adalah *tahap di mana gerakan-gerakan seperti gerakan demokrasi dan gerakan buruh di Eropa, gerakan hak suara yang diajukan oleh wanita, dan gerakan-gerakan kemerdekaan di daerah jajahan di tahun-tahun berikutnya*, ataupun *sejumlah gerakan yang banyak muncul di negara-negara otokratis dewasa ini*, hanya menyediakan sebuah sarana efektif bagi pengungkapan keluhan-keluhan dan usaha untuk melahirkan perubahan-perubahan politik. *Tahap yang kedua*, muncul ketika *pencapaian pemerintahan yang representatif, persamaan hak pilih universal, dan sistem pemilihan umum yang bebas dan rahasia berusaha mengurangi intensitas aksi-aksi politik di luar mekanisme lembaga formal, walaupun dalam periode krisis gerakan sosial, seperti gerakan para penganggur dan kaum fasis di beberapa negara Eropa, dapat berkembang*. *Tahap yang ketiga*, adalah *tahap yang kini berlangsung di negara demokrasi-demokrasi Barat*. Pada tahap ini dijumpai banyak sekali *kebangkitan-kebangkitan dan pembentukan berbagai gerakan sosial sebagai suatu ciri kehidupan politik yang kurang lebih bersifat permanen*, yang mencerminkan suatu gerakan yang lebih mendasar untuk memperluas demokrasi. *Pemerintahan yang representatif, partai-partai dan pemilihan umum*, kini nampaknya semakin intens memberikan kerangka kerja yang esensial namun tidak memadai untuk membangun suatu masyarakat demokratis dalam artian pemerintahan yang radikal yang diselenggarakan oleh rakyat.

Menurut Budiardjo (1983), gerakan (*movement*) berbeda dengan partai. Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik, *gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental* sifatnya, dan kadang-kadang malahan bersifat *ideologi*.

Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini, kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya atau instansi pemerintah atau menteri yang berwewenang. Jelaslah bahwa kelompok kepentingan mempunyai orientasi yang jauh lebih sempit daripada partai politik, yang - karena mewakili pelbagai golongan - lebih banyak memperjuangkan kepentingan umum. Juga organisasi kelompok kepentingan lebih kendor dibanding dengan partai politik.

Berbagai definisi partai politik yang dikutip Budiardjo (1983) sebagai berikut:

- a. Carl J. Friedrich: Partai politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun material”.
- b. R.H. Soltau: Partai politik adalah “sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
- c. Sigmund Neumann: Partai politik adalah “organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Selanjutnya Giddens (1986), mengemukakan bahwa suatu *partai yang mempunyai kaitan dengan suatu asosiasi sukarela apa pun mempunyai maksud memperoleh penguasaan pengarahannya sesuatu organisasi agar bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu di dalam organisasi tersebut*. Makna dari definisi ini, adalah bahwa partai-partai bisa berada dalam bentuk organisasi apa saja sepanjang ada pembentukan kelompok-kelompok yang

dikerahkan secara bebas: jadi bisa dimulai dari perkumpulan olah raga sampai ke negara. Landasan untuk mendirikan partai-partai, bahkan partai-partai politik modern, beraneka ragam. Suatu situasi kelas atau situasi bersama, bisa saja menjadi dasar satu-satunya bagi penerimaan anggota suatu partai politik, akan tetapi hal ini jarang terjadi. Di dalam tiap kasus khusus, partai-partai bisa mewakili kepentingan-kepentingan yang ditentukan oleh situasi kelas atau situasi status akan tetapi partai-partai itu tidak perlu merupakan partai kelas murni ataupun partai status murni; dalam kenyataan, partai-partai lebih mungkin menjadi jenis-jenis campuran, bahkan kadang-kadang di luar pembagian seperti itu.

Pertumbuhan negara modern telah membawa serta perkembangan partai-partai politik massa dan munculnya politisi-politisi profesional. Seseorang yang kerjanya berkenaan dengan perjuangan kekuasaan politik, mungkin saja hidupnya untuk politik ataupun dapat saja dari politik. Seseorang yang mengandalkan kegiatan-kegiatan politiknya sebagai sumber utama bagi pendapatannya, (hidup dari politik); orang yang sepenuhnya menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik, akan tetapi tidak menerima penghasilannya dari sumber ini (hidup untuk politik). Suatu tata politik yang di dalamnya dilakukan pengerahan tenaga bagi posisi-posisi berkuasa, tentunya pengerahan itu diarahkan agar memperoleh orang-orang hidup untuk politik, yang biasanya terdiri atas rentir dan bukannya para entrepreneur. Hal ini tidak berarti bahwa politisi macam itu akan melakukan kebijakan, yang sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan-kepentingan kelompok kelas atau kelompok status dari mana politisi itu berasal.

B. FUNGSI ORGANISASI KEKUATAN SOSIAL POLITIK

Dalam literatur ilmu politik, organisasi kekuatan sosial politik menjalankan beberapa fungsi. Di antara beberapa fungsi tersebut menurut R. Wiyono (1982) adalah: pendidikan politik, sosialisasi politik, seleksi politik, pemaduan politik, memperjuangkan kepentingan politik, komunikasi politik, dan pengawasan politik.

1. Pendidikan Politik (*Political Education*)

Pendidikan Politik yang dijalankan oleh organisasi kekuatan sosial politik untuk anggota masyarakat, terutama adalah pendidikan mengenai asas, tujuan dan program dari organisasi kekuatan sosial politik yang

bersangkutan. Maksud pendidikan politik ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban politik dari anggota masyarakat, sehingga dengan demikian anggota masyarakat tersebut dapat berpartisipasi penuh dalam rangka untuk mencapai tujuan politik.

2. Sosialisasi Politik (*Political Socialization*)

Setiap organisasi kekuatan sosial politik sudah tentu mempunyai asas, tujuan dan program, sebagai identitas daripada organisasi. Asas, tujuan, dan program ini oleh setiap organisasi kekuatan sosial politik diusahakan untuk diterapkan dalam masyarakat, artinya agar anggota masyarakat berpikir dan berbuat sesuai asas, tujuan, dan program dari organisasi kekuatan sosial politik yang bersangkutan, sebab justru asas, tujuan, dan program tersebut adalah kehendak dari masyarakat yang harus direalisasikan. Usaha sosialisasi politik ini biasanya dilakukan bersama-sama pendidikan politik.

Menurut Budiardjo (1983), sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Di samping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Seleksi Politik (*Political Selection*)

Yang dimaksud seleksi politik (*political selection*) adalah mengadakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin untuk masyarakat yang bersangkutan. Tentunya pemimpin atau calon yang dikehendaki adalah mereka yang dapat menghayati aspirasi dan harapan dari yang dipimpin serta dapat mengarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berkaitan dengan seleksi politik adalah rekrutmen politik. Fungsi rekrutmen menurut Budiardjo (1983) adalah bermaksud untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader-kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama.

4. Pemaduan Politik (*Political Aggregation*)

Dalam setiap masyarakat terdapat sejumlah persoalan-persoalan politik yang memerlukan pemecahan, dan untuk memecahkan persoalan-persoalan itu diperlukan pemikiran-pemikiran politik. Agar supaya tidak terjadi salah pengertian dan menimbulkan perpecahan, maka perlu adanya pemaduan pemikiran-pemikiran politik.

Pemaduan pemikiran politik di samping yang terdapat dalam masyarakat, juga perlu diusahakan pemaduan di antara pemimpin-pemimpin politik, sebab jika tidak organisasi kekuatan sosial politik dapat menimbulkan perpecahan, yang tentunya berakibat lebih lanjut dengan adanya perpecahan dalam masyarakat. Di sinilah pentingnya fungsi organisasi kekuatan politik melaksanakan pemaduan politik.

Menurut Budiardjo (1983), salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan”.

Semua kegiatan di atas dilakukan oleh partai. Partai politik selanjutnya merumuskan sebagai usul kebijaksanaan. Usul ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (*public policy*). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

5. Memperjuangkan Kepentingan Politik (*Interest Articulation*)

Pembentukan setiap organisasi kekuatan sosial politik adalah bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan alat untuk mencapai atau memperjuangkan tujuan politik yang berupa kepentingan politik dari masyarakat. Sebagai alat berarti harus ada kegunaan untuk kehidupan masyarakat.

Fungsi memperjuangkan kepentingan politik ini, haruslah dilakukan bersama dengan fungsi pemaduan politik, sebab jika tidak dilakukan

bersama-sama akan terdapat bermacam-macam cara untuk memperjuangkan kepentingan politik dari suatu masyarakat, yang akibatnya mungkin kepentingan politik tersebut tidak akan atau lamban dicapai dan ini jelas merugikan masyarakat.

6. Komunikasi Politik (*Political Communication*)

Melalui organisasi kekuatan sosial politik terdapat komunikasi atau hubungan timbal balik antara pemikiran politik yang terdapat dalam masyarakat dengan pemikiran politik dari pemimpin-pemimpin organisasi kekuatan sosial politik. Komunikasi tersebut dimaksudkan agar terjadi *change of ideas* yang dirasa bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam hubungan dengan komunikasi politik tersebut, Budiardjo (1983) mengemukakan bahwa partai politik berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, di mana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

7. Pengawasan Politik (*Political Control*)

Suatu pemerintahan negara dibentuk adalah dengan maksud untuk kepentingan masyarakat, sehingga segala tindak tanduk dari pemerintah negara haruslah diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat tersebut. Agar maksud ini tercapai, maka segala tindak tanduk dari pemerintah negara harus diawasi jangan sampai menyeleweng dari maksud semula. Untuk mengawasi segala tindak tanduk dari pemerintah negara ini adalah menjadi tanggung jawab dan dijalankan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh organisasi politik.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Organisasi kekuatan sosial politik diartikan sama dengan partai politik. Jelaskan pengertian partai politik!
- 2) Jelaskan pengertian gerakan sosial dan tahap-tahap perkembangan gerakan sosial modern!
- 3) Jelaskan fungsi partai politik yang bertujuan untuk menghubungkan antara yang memerintah dan yang diperintah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Berbagai definisi partai politik banyak dikemukakan para ahli, misalnya Carel J. Friedrick RH. Soltan, Sigmund Neumann misalnya. Pada dasarnya partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik atau kelompok yang secara terorganisasi bertujuan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan, serta menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum partai.
- 2) Gerakan sosial dalam artian luas adalah usaha bersama dari anggota-anggota masyarakat untuk meningkatkan atau menentang perubahan di mana usaha-usaha tersebut sangat berperan. Dalam kalimat lain dapat dikemukakan sebagai suatu sarana dari anggota-anggota masyarakat untuk dapat mengungkapkan ketidaksetujuan dan oposisi atau menantang secara tidak langsung.
Adapun tahap-tahap perkembangan gerakan sosial modern Anda pelajari kembali pada subtopik Gerakan Sosial dan Partai Politik.
- 3) Fungsi ini mencerminkan peranan partai politik sebagai perantara (broker) dalam bursa ide. Cirinya berupa komunikasi politik atau hubungan timbal-timbal antara pemikiran politik dari masyarakat dengan pemikiran politik dari pemimpin-pemimpin politik. Jadi akan terjadi dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.

**RANGKUMAN**

Dalam kepustakaan ilmu politik organisasi kekuatan sosial politik diartikan sama dengan partai politik. Partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan dan gerakan sosial. Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik atau kelompok yang secara terorganisasi bertujuan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan, serta menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan pada lembaga-lembaga politik untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan. Gerakan sosial merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru dengan memakai cara-cara politik.

Gerakan sosial merupakan suatu sarana dari anggota-anggota masyarakat untuk dapat mengungkapkan ketidaksetujuan dan oposisi atau menantang secara tidak langsung. Sebaliknya, partai politik merupakan sarana yang sangat diperlukan demi mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Fungsi partai politik di antaranya, seperti; menjalankan pendidikan politik terhadap anggota masyarakat, melakukan sosialisasi politik, melaksanakan seleksi politik, memadukan pemikiran-pemikiran politik yang berbeda, memperjuangkan kepentingan politik, menyebarkan informasi-informasi melalui komunikasi politik, serta melakukan pengawasan politik.

**TES FORMATIF 3**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dalam literatur ilmu politik, organisasi kekuatan sosial politik diartikan sama dengan....
 - A. partai politik
 - B. partai sosialis
 - C. gerakan sosial
 - D. *interest group*

- 2) Suatu usaha bersama yang dilakukan untuk meningkatkan atau menantang perubahan, disebut gerakan
 - A. politik
 - B. sosial
 - C. partai
 - D. sosialis

- 3) Golongan yang berusaha mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapat keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan, disebut
 - A. partai politik
 - B. gerakan sosial
 - C. *interest group*
 - D. gerakan politik

- 4) Berikut ini merupakan tahap-tahap perkembangan gerakan sosial modern *kecuali* periode
 - A. munculnya gerakan
 - B. pemerintahan representatif
 - C. kebangkitan-kebangkitan
 - D. tingkat kematangan

- 5) Karakteristik suatu gerakan yang membedakan dengan partai politik adalah seperti berikut, *kecuali*
 - A. memperjuangkan kekuasaan
 - B. tujuan fundamental sifatnya
 - C. ikatan di antara anggotanya kuat
 - D. organisasi kurang ketat

- 6) Karakteristik kelompok kepentingan yang membedakan dengan partai politik adalah....
 - A. memperjuangkan kepentingan
 - B. mempengaruhi lembaga politik
 - C. mempengaruhi instansi pemerintah
 - D. menguasai kekuasaan pemerintah

- 7) Fungsi partai politik yang dapat menimbulkan partisipasi politik dari anggota masyarakat, adalah fungsi
 - A. sosialisasi politik
 - B. pendidikan politik
 - C. komunikasi politik
 - D. pemanduan politik

- 8) Fungsi partai politik yang biasanya dilakukan bersama-sama dengan fungsi partai politik lainnya, adalah fungsi
- A. sosialisasi politik
 - B. pendidikan politik
 - C. komunikasi politik
 - D. pemanduan politik
- 9) Fungsi partai politik, di mana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah, adalah fungsi
- A. sosialisasi politik
 - B. pendidikan politik
 - C. komunikasi politik
 - D. pemanduan politik
- 10) Fungsi partai politik yang berusaha mencegah timbulnya perpecahan, adalah fungsi....
- A. sosialisasi politik
 - B. pendidikan politik
 - C. komunikasi politik
 - D. pemanduan politik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A objek dari istilah sosial adalah masyarakat (*society*).
- 2) C terikat satu dengan lainnya, termasuk dalam unsur sistem hidup bersama.
- 3) B sosiologi mempelajari unsur-unsur masyarakat secara keseluruhan.
- 4) D politik cenderung diartikan sebagai kemahiran pada masalah-masalah kenegaraan.
- 5) A hakikat dari politik adalah memperjuangkan, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan.
- 6) C distribusi adalah pembagian dan penjatahan dari nilai dalam masyarakat secara mengikat.
- 7) C rumusan pembahasan sosiologi politik adalah mengkaji hubungan kekuasaan dengan struktur masyarakat.
- 8) B sosiologi politik menelaah bagaimana persoalan-persoalan sosial mempengaruhi proses politik.
- 9) A keduanya membahas distribusi dan olahan kekuasaan di masyarakat.
- 10) C partisipasi politik tidak harus dilihat secara positif, tetapi juga secara negatif selama tindakan tersebut dinilai berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusan.

Tes Formatif 2

- 1) A adanya kekuasaan, termasuk kekuatan harus diterima oleh umat manusia.
- 2) C kekuatan diartikan sebagai gejala sosial, kekuasaan fisik, kekerasan, dan ancaman-ancaman fisik lainnya.
- 3) B konsepsi dominasi lebih khusus yang hanya mengacu kepada kasus-kasus pemaksaan kekuasaan.
- 4) D istilah destruktif merupakan salah satu bentuk teknik untuk mewujudkan kekuasaan.
- 5) C berdasarkan hukum merupakan salah satu jenis pola hubungan dominasi.
- 6) A kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan organisasi sosial.

- 7) B kekuasaan politik ditujukan pada negara atau pemerintah yang berwenang mengambil kebijaksanaan.
- 8) D penghisapan merupakan akibat dari penggunaan kekuasaan yang dapat menimbulkan oposisi.
- 9) A kekuasaan politik juga bertujuan untuk mempengaruhi aktivitas negara di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- 10) D lembaga pemerintah antara lain adalah kekuasaan politik yang terwujud dalam negara.

Tes Formatif 3

- 1) A partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan.
- 2) B gerakan sosial merupakan kelompok yang menginginkan perubahan-perubahan.
- 3) C interest group (kelompok kepentingan) bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan.
- 4) D tingkat kematangan merupakan salah satu tahap perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara.
- 5) A memperjuangkan kekuasaan merupakan tujuan dari partai politik.
- 6) D karena menguasai kekuasaan pemerintahan merupakan karakteristik partai politik.
- 7) B fungsi pendidikan politik bermaksud untuk memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban politik dari anggota masyarakat.
- 8) A sosialisasi politik dilakukan melalui usaha memperkenalkan program partai politik, dan biasanya dilakukan bersama dengan fungsi pendidikan politik.
- 9) C fungsi komunikasi politik bertujuan untuk menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah.
- 10) D fungsi pemanduan politik bertujuan untuk memadukan pemikiran-pemikiran politik yang berbeda baik dalam masyarakat maupun di antara pemimpin-pemimpin politik.

Penjelasan Istilah Teknis

1. Politik, Teori : Bahasa dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Teori politik adalah bahasan dan renungan tentang tujuan dan kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang timbul oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut.
2. Sosial Equilibrium: Keseimbangan dalam masyarakat, suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok dari masyarakat berfungsi dan saling mengisi.
3. Gerakan Sosial (*Social mobility*): Suatu proses dimana unsur-unsur sosial ekonomis dan psikologis dari masyarakat mulai menunjukkan peluang-peluang ke arah pola-pola baru melalui sosialisasi dan pola-pola perilaku yang berwujud pada aspek-aspek kehidupan modern.
4. Gerakan Politik (*Political Movement*): Suatu kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau yang kadang-kadang ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali dengan memakai cara-cara politik.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam (1983), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Bottomore, Tom (1983), *Sosiologi Politik*, Bina Aksara, Jakarta.
- Duverger, Maurice (1993), *Sosiologi Politik*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Deverger, Maurice (1981), *Sosiologi Politik*, Rajawali, Jakarta.
- Giddens, Anthony (1986), *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*, UI - Press, Jakarta.
- Polama, Margaret M. (1987), *Sosiologi Politik Kontemporer*, Rajawali, Jakarta.
- Sulistyo, Hermawan (1990), *Sosiologi Politik : Ruang Lingkup dan Pengembangannya*, dalam Jurnal Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono (1990), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wiyono. R (1982), *Organisasi Kekuatan Sosial Politik di Indonesia*, Alumni, Bandung.